

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pada era reformasi ini, arah pemerintahan Indonesia menunjukkan peningkatan tekanan terhadap pentingnya akuntabilitas, baik di level nasional maupun lokal. Publik kini semakin bersuara dan kritis dalam menilai kinerja pemerintah, mendorong aparatur negara di pusat maupun daerah untuk menerapkan prinsip-prinsip pertanggungjawaban publik. Demi membangun tata kelola pemerintahan yang efektif dan jujur, pemerintah dituntut untuk terus mengembangkan transparansi serta memperkuat akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Hal ini diwujudkan melalui peningkatan transparansi dan diseminasi informasi kepada publik. Langkah ini krusial dalam menjaga keakuratan laporan keuangan yang menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan. Laporan keuangan yang informatif dan relevan menjadi kunci keberhasilan bagi pemerintah dalam mempertanggung jawabkan kinerja keuangannya kepada masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah dituntut memberikan informasi yang kredibel dalam laporan keuangan yang mereka sajikan (Lestari & Dewi, 2020).

Menurut Nurdin dan Milka, Informasi yang berguna bagi pengguna adalah informasi yang memiliki nilai. Nilai informasi merujuk pada data yang dapat dimanfaatkan oleh para penggunanya untuk membuat keputusan yang tepat dalam mengatasi berbagai masalah. Nilai dari suatu informasi dapat diukur berdasarkan kegunaannya dalam proses pengambilan

keputusan setelah informasi tersebut diterima. Elemen paling penting dalam nilai informasi adalah kemampuan seseorang untuk membuat keputusan berdasarkan informasi yang diterimanya. Apabila informasi tersebut tidak dapat digunakan untuk mengambil keputusan, maka informasi tersebut dianggap tidak relevan untuk dijadikan dasar tindakan selanjutnya (M. Nurdin & Milka, 2021). Dalam konteks ini, informasi yang efektif harus memenuhi kriteria tertentu agar dapat dianggap bermanfaat. Informasi tersebut harus relevan, sesuai dengan kriteria yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, maka hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah (Handayani et al., 2022).

Peningkatan kualitas laporan keuangan sangat bergantung pada peran strategis sumber daya manusianya sendiri. Individu yang memiliki kompetensi tinggi serta pengetahuan yang kuat mengenai manajemen keuangan memegang peran sentral dalam mendorong terciptanya laporan keuangan yang andal. Kompetensi tersebut mencakup penguasaan terhadap standar akuntansi pemerintahan serta keterampilan teknis dalam menyusun laporan keuangan secara tepat dan sesuai aturan. Hal ini dapat meningkatkan kinerja organisasi tersebut. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125), yang kemudian mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 mengatur bahwa pengelolaan keuangan sepenuhnya menjadi tanggung jawab

Pemerintah Daerah (Pemda). Studi oleh Rivaldo dkk. menunjukkan bahwa pemahaman yang baik tentang peraturan akuntansi pemerintahan dan keahlian sumber daya manusia yang cukup meningkatkan kualitas informasi laporan keuangan daerah. Ini menunjukkan bahwa semakin banyak pemahaman tentang peraturan akuntansi dan keahlian aparatur, semakin besar kemungkinan membuat laporan keuangan yang dapat diandalkan, relevan, dan dapat diakses. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) serta penguasaan praktik akuntansi yang tepat sangat penting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di pemerintahan (Rivaldo Peku Djawang et al., 2019).

Di samping kualitas sumber daya manusia, implementasi Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menjadi salah satu upaya nyata dalam mendorong terciptanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Melalui penerapan SAP, diharapkan penyusunan laporan keuangan, baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah, dapat meningkat mutunya. Selanjutnya, laporan keuangan tersebut akan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memperoleh opini atas kewajaran penyajiannya, yang bertujuan meningkatkan kredibilitas laporan sebelum diserahkan kepada para pemangku kepentingan (Stalkholder), seperti investor, kreditor, dan masyarakat umum demi mendukung transparansi serta akuntabilitas keuangan Negara (Jusmani et al., 2022).

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) juga memiliki dampak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Penerapan SAP yang efektif akan meningkatkan kredibilitas laporan keuangan pemerintah daerah, meskipun tidak semua faktor dari penerapan tersebut dapat memberikan pengaruh yang signifikan. SAP dirancang untuk memastikan bahwa laporan keuangan memenuhi standar tertentu, sehingga informasi yang disajikan dapat dipahami dan dipercaya oleh para pemangku kepentingan. Namun dalam praktiknya, banyak pemerintah daerah menghadapi berbagai tantangan dalam menerapkan SAP secara konsisten. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman dan pengetahuan tentang standar akuntansi di kalangan pegawai (Cinta Bella Kristina Purba et al., 2024). Pelatihan dan sosialisasi mengenai SAP perlu ditingkatkan agar pegawai dapat menerapkan standar tersebut dengan baik. Dengan demikian, peningkatan kompetensi SDM dan penerapan SAP harus berjalan beriringan untuk mencapai hasil yang optimal (E. Nurdin et al., 2024).

Kewajiban untuk menyusun laporan keuangan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan ini mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Selain itu, akuntansi di tingkat OPD juga diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 mengenai Standar

Akuntansi Pemerintah, yang menegaskan bahwa penyusunan laporan keuangan dilakukan di tingkat satuan kerja tersebut (Izzati, 2021).

Dari hasil pemeriksaan BPK mengatakan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Tegal pada tahun 2016 dan 2018 masih mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), hasil tersebut menunjukkan bahwa kualitas LKPD Kota Tegal masih lemah yang menyebabkan laporan keuangan yang disajikan belum berkualitas. Hal tersebut disebabkan oleh adanya sejumlah permasalahan yang masih berkaitan ketidakpatuhan peraturan perundang-undangan dalam hasil pemeriksaan LKPD kota tegal. Pokok-pokok kelemahan yang ditemukan BPK diantaranya: 1) Kekurangan volume pada pelaksanaan pekerjaan fisik, 2) Pertanggungjawaban perjalanan dinas yang tidak tertib, 3) Pengelolaan aset tetap yang belum optimal. 4) Keterlambatan dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban belanja hibah, 5) Ketidaktepatan dalam penganggaran belanja, 6) Pencatatan dan pengelolaan aset tetap yang belum memadai, serta 7) Adanya tumpang tindih dalam pelaksanaan pekerjaan konsultan pengawas.

Namun pada tahun 2019-2023 Kota Tegal telah berhasil mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari pemeriksaan BPK-RI, hal ini menunjukkan adanya peningkatan kualitas dari laporan keuangan pemerintah Kota Tegal seperti akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah serta pelayanan yang semakin meningkat. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah diyakini dipengaruhi oleh beberapa aspek, antara lain

kapabilitas tenaga kerja di bidang keuangan, tingkat penerapan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku, serta sejauh mana teknologi informasi dimanfaatkan dalam proses pelaporan. Karena ketiganya saling berkaitan dalam memastikan proses penyusunan laporan keuangan berjalan secara akurat, andal, dan sesuai dengan standar yang berlaku.

Faktor pertama yang sangat berpengaruh adalah Kompetensi Sumber Daya Manusia. Sumber Daya Manusia memiliki peran krusial dalam sebuah organisasi, sehingga diperlukan pengelolaan yang optimal agar dapat memberikan kontribusi maksimal terhadap bagaimana tujuan organisasi dapat diraih. Sumber Daya Manusia merupakan fondasi utama dalam sebuah organisasi atau instansi untuk mewujudkan visi dan misinya. Oleh karena itu, sebaik apapun sistem yang diterapkan dalam sebuah organisasi, hal tersebut tidak akan efektif jika tidak didukung oleh SDM yang berkualitas. Faktor kedua adalah implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan. Mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan diwajibkan memiliki empat karakteristik kualitatif utama, yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, serta mudah dipahami. Apabila laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) telah mencerminkan keempat unsur tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kualitas penyusunan laporan keuangan oleh pemerintah daerah telah mengalami peningkatan. Peningkatan kualitas laporan keuangan sangatlah penting karena laporan tersebut memuat banyak informasi yang menjadi dasar dalam pengambilan keputusan bagi pemerintah. Namun, di Indonesia,

masih terdapat berbagai tantangan terkait rendahnya kualitas laporan keuangan yang belum sepenuhnya memenuhi standar yang diharapkan. Selain itu pemanfaatan teknologi informasi juga berperan penting dalam pengelolaan laporan keuangan. Hal ini dapat menciptakan kesempatan bagi berbagai pihak untuk dengan cepat dan tepat dalam mengakses, mengelola, serta memanfaatkan informasi keuangan daerah. Pemerintah Daerah (Pemda) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diwajibkan untuk memanfaatkan teknologi informasi, sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 65 Tahun 2010 yang merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Tegal memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan serta menggunakan kemajuan teknologi informasi. Tujuannya agar dapat menyalurkan informasi keuangan daerah yang berkualitas, sebagai wujud pelayanan kepada masyarakat. Di era persaingan yang kian sengit, pemanfaatan teknologi informasi menjadi strategi penting bagi organisasi untuk memperkuat sistem informasinya dan meraih keunggulan kompetitif. Akan tetapi, penerapan teknologi informasi memiliki sejumlah kendala, seperti kondisi perangkat keras dan lunak, pembaruan data, serta kualitas sumber daya manusia. Kendala-kendala ini berpotensi menghambat optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi di lingkungan instansi pemerintah (Bestari & Wahyuni, 2023).

Menurut penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Dwi Susliyanti terkait pengaruh kompetensi sumber daya manusia, implementasi standar akuntansi pemerintah berperan penting dalam meningkatkan kualitas informasi pada laporan keuangan, yang menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia dan penerapan prinsip-prinsip akuntansi sektor publik memiliki pengaruh signifikan terhadap mutu informasi yang dihasilkan (Dwi Susliyanti, 2021). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Parlindo, mengungkapkan bahwa kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi memiliki pengaruh terhadap nilai informasi laporan keuangan. Artinya, kualitas informasi dalam laporan keuangan pemerintah daerah akan semakin meningkat apabila pegawai memiliki kompetensi sumber daya manusia yang memadai dan pemanfaatan teknologi informasi dilakukan secara optimal (Parlindo, 2022). Menurut penelitian Salma, dkk juga mengatakan bahwa kompetensi sumber daya memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai informasi laporan keuangan (Salma et al., 2024). Dalam studi yang dilakukan oleh Qomah mengenai berbagai faktor yang memengaruhi mutu informasi dalam laporan keuangan pemerintah daerah, ditemukan bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) memberikan dampak yang signifikan terhadap kualitas informasi tersebut. Sebaliknya, kompetensi sumber daya manusia dan penggunaan teknologi informasi tidak menunjukkan pengaruh yang berarti terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Qomah, 2021).

Dari penelitian-penelitian terdahulu yang terkait dengan topik yang akan diangkat pada penelitian ini menggambarkan masih banyak permasalahan yang terjadi baik dalam pelaporan maupun dalam penyajian laporan keuangan pemerintah daerah. hal ini dikarenakan belum sepenuhnya laporan keuangan memiliki kriteria nilai informasi yang disyaratkan. Mengingat bahwa karakteristik kualitatif merupakan unsur penting sebagai dasar pengambilan keputusan, untuk dapat memenuhi kriteria tersebut, maka pengelolaan keuangan pemerintah daerah tidak terlepas dari peran pegawai yang mengelola dan melakukan pelaporan keuangan (Izzati, 2021).

Isu ini menarik untuk diteliti karena masih terdapat beberapa permasalahan pemerintah daerah terkait nilai informasi pelaporan keuangan yang disajikan. Peneliti menggunakan responden staf bagian bendahara pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Tegal. Peneliti juga ingin membuktikan apakah hasil penelitian yang dilakukan saat ini dengan penelitian sebelumnya akan memiliki hasil yang sama atau tidak jika dilakukan ditempat yang berbeda. Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang, **“Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tegal”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan diatas dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Apakah kompetensi sumber daya manusia secara parsial berpengaruh signifikan terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah daerah?
- b. Apakah penerapan standar akuntansi pemerintah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah daerah?
- c. Apakah pemanfaatan teknologi informasi secara parsial signifikan terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah daerah?
- d. Apakah kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintahan dan pemanfaatan teknologi informasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah daerah?

## 1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas agar lebih fokus dan terarah, maka permasalahan dibatasi pada: Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tegal. Hanya pada pegawai bagian bendahara pada OPD Kota Tegal tahun 2025.

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menguji pengaruh kompetensi sumber daya manusia secara signifikan terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah daerah kota tegal.
- b. Untuk menguji pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah secara signifikan terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah daerah kota tegal.
- c. Untuk menguji pengaruh pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh secara signifikan terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah daerah kota tegal..
- d. Untuk menguji pengaruh kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintahan dan pemanfaatan teknologi informasi secara signifikan terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah daerah kota tegal.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik bagi peneliti maupun bagi para pembaca atau pihak lain secara teoritis dan praktis.

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori akuntansi publik yang bermanfaat bagi pemerintah Kota Tegal dan menjadi bahan evaluasi baik berupa masukan maupun

pertimbangan terkait laporan keuangan daerah. Serta untuk menambah ilmu pengetahuan dan informasi bagi masyarakat mengenai pentingnya penyajian laporan keuangan Pemerintah Kota Tegal dan kualitas informasi atas laporan keuangan tersebut.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan melalui rekomendasi pengembangan kompetensi sumber daya manusia dan penerapan standar akuntansi pemerintahan yang baik. Hal ini akan mendukung pengambilan yang lebih tepat dalam pengelolaan anggaran dan sumber daya, serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat terjaga.

### b. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai dasar untuk studi lebih lanjut dalam bidang akuntansi pemerintahan, serta menambah pemahaman tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi nilai informasi laporan keuangan.

### c. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman tentang pentingnya kompetensi sumber daya manusia dan penerapan standar akuntansi dalam konteks laporan keuangan

pemerintah serta dapat menjadi bahan referensi atau masukan untuk penelitian selanjutnya sebagai sarana untuk menambah wawasan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian.